

Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 4, No. 2, Oct 2015, p-ISSN: 2252-5793, hlm. 151-174

PENGELOLAAN MODEL PENDIDIKAN INTEGRATIF DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL: STUDI KASUS DI PESANTREN DARUL MUTTAQIEN PARUNG-BOGOR DAN PESANTREN AL-KARIMIYAH SAWANGAN BARU DEPOK JAWA BARAT

Iis Abdul Haris¹, Didin Saefudin², Bambang Suryadi²

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstract

Initially, pesantren is a simple religious boarding school, without systematic teaching. Nowadays, pesantren developed in such a way, either in the form of physical and system curriculum concepts. Its existence equip madrasah or college classical format. Restore the function and role of schools in national education. Reveal the purpose of this research is the management concept of the ideal model of integrative education and Viewing the relationship between management education models integrated with the achievement of the National Education held at Darul Muttaqien boarding school and Al-Karimiyah, West Java. This study used a qualitative approach to the design multicase. The technique of collecting data through interviews, participant observation and documentation. The results of this study indicate that integrative education conducted in schools that promote a very significant aspect of morality. Style education schools that emphasize a balance between science and morality will make an intelligence generation, virtuous and moral. Integrative Islamic Education seeks combines two things that is still treated dichotomacally, namely to harmonize the relationship revelation re-sense, which is dichotomacally treatment of both has resulted in the separation of religious knowledge with general knowledge. Management education in Darul Muttaqien and Al Karimiyah Muttaqien still maintaining the purity of its original identity as a place steeped in religious sciences (tafaqquh fiddin) through the classics (yellow book) written by the scholars' medieval. However, in both educational boarding school is not just focused on the classics (read: religious knowledge), but also include general subjects and skills. Both pesantren in general have responded positively to the national education goals.

Keywords—*integratif islamic education, pesantren, national education goal*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya strategis untuk meningkatkan mutu kebudayaan dan peradabannya. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi gersang dari nilai-nilai luhur. Sebaliknya, kebudayaan tanpa pendukung-pendukungnya yang sadar dan terdidik, pada akhirnya akan menjadi “tak terhitungkan” dalam perjalanan sejarah.

Diketahui bahwa Pendidikan Nasional dilaksanakan berdasarkan landasan filosofi bangsa, yakni Pancasila, yang merupakan nilai-nilai luhur yang selalu disosialisasikan secara terus menerus oleh aparaturnegara. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003, hal itu dikemukakan secara tegas. Disebutkan bahwa inti tujuan pendidikan nasional adalah “meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang meliputi berbagai segi, termasuk iman dan taqwa”. [1]

Dengan demikian, pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila berarti mengarah pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, baik menyangkut kecerdasan, budi pekerti, maupun keterampilan secara teoritis.

Urgensi pendidikan bagi suatu bangsa sebagaimana dikatakan oleh H.M. Arifin, “disebabkan adanya beberapa potensi dalam setiap diri manusia, yakni potensi pedagogis, potensi psikologis, potensi sosiologis dan kultural.” [2]

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling dimuliakan oleh Allah melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Al-Qur’an:

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. Al-Isra: 70)

Atas dasar itu maka seluruh proses kehidupan manusia ditandai dengan kegiatan belajar mengajar atau pendidikan. Oleh karena itu, jika manusia ingin hidup dan tetap menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, maka mereka harus senantiasa belajar dan sekaligus mengajarkan ilmunya. Dengan demikian, maka kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari proses pendidikan.

Pelaksanaan Pendidikan nasional, dalam kenyataannya, tentu saja dipadukan dengan program-program pembangunan di segala bidang, dengan titik berat antara lain:

Pertama, menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air; *Kedua*, mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan rumah tangga serta masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat, baik perorangan maupun kolektif; *Ketiga*, hanya “memberikan ikan”, *Keempat*, menggariskan agar setiap jenjang diintegrasikan cabang studi yang berusaha menginterpretasikan makna hidup manusia di dunia seperti berfikir tertib; *Kelima*, meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan sekaligus mengarahkan pada kebutuhan pembangunan di segala bidang dengan sistem pembinaan yang mantap serta terpadu, khususnya pendidikan dasar serta pendidikan kejuruan. [3]

Merespon kebijakan pemerintah tersebut, pesantren telah membuka diri dalam perkembangan perubahan sistem pendidikan. Namun menurut Azyumardi Azra. [4] para eksponen pesantren cenderung lebih hati-hati dalam menjawab perubahan di seke-

lingingnya. Mereka tidak tergesa-gesa mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam modern sepenuhnya, tetapi menerimanya dalam skala terbatas, yakni sebatas melakukan penyesuaian yang mereka anggap akan mendukung kontinuitas pesantren itu sendiri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal.

Keberadaan Pondok Pesantren dianggap masih penting keberadaannya, mengapa pesantren tetap bertahan sampai sekarang. Derasnya arus modernisasi pendidikan Islam tidak dapat melunturkan sistem kelembagaan pesantren. Akan tetapi, sedikit sekali pemimpin-pemimpin pesantren (Kyai) yang menyadari potensi pesantren bagi pembangunan nasional. Sedikit sekali yang mau introspeksi secara obyektif untuk beradaptasi secara positif terhadap perkembangan masyarakat. Akhirnya, pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan Islam modern, seperti madrasah. Pesantren sulit menerima perubahan secara total agar menjadi lembaga pendidikan semacam madrasah. Dengan mendirikan madrasah di dalam pesantren, maka pesantren tetap dapat dipertahankan sebagai tempat belajar agama Islam bagi para santri yang tinggal di pesantren atau di sekitar pesantren. Selain itu, Kyai tetap bisa mengamalkan praktek agama sesuai dengan tradisi pesantren yang berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka. Dengan mendirikan madrasah, pesantren dapat memberikan relevansinya bagi tuntutan zaman dan masyarakat.

Lebih dari itu, pesantren semakin membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Cipasung adalah contoh pesantren yang telah mampu mendirikan sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Bahkan kata Nurcholis Madjid.[5] pesantren yang pertama kali mendirikan sekolah umum seperti SMA adalah Pesantren Tebuireng Jombang.

Dengan demikian, pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diversifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. Bahkan, pesantren juga telah memberikan pilihan yang lebih banyak lagi bagi masa depan santri-santrinya. Kini santri tidak hanya dikhususkan untuk menjadi ahli agama, tetapi didorong untuk memasuki profesi-profesi lain dengan memberikan pendidikan keterampilan, seperti komputer, pertanian, pertukangan, perbengkelan, elektronika, administrasi, dan bahasa Inggris. Dengan luasnya sprektum ilmu di pesantren akan membuka peluang bagi santri memasuki bidang-bidang lainnya, sehingga santri tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga ahli dalam bidang kehidupan lainnya. Ini merupakan perkembangan bagus bagi pesantren dalam menata posisi pesantren di tengah realitas sosial modern dan kompleks.

Demikianlah, setahap demi setahap pesantren telah menyelaraskan diri dengan cita-cita dan sistem pendidikan nasional Indonesia. Di bidang pendidikan, kebijakan pemerintah memberikan pembinaan dan motivasi agar pesantren relevan dengan tuntutan zaman. Pesantren kemudian menanggapi kebijakan pemerintah dengan mengadakan perubahan terhadap pola pendidikannya agar selaras dengan pendidikan nasional. Dalam hal ini, pemerintah membangkitkan inisiatif pesantren sendiri untuk bersikap responsif terhadap perkembangan masyarakat di sekelilingnya. Secara bertahap, akhirnya pesantren mampu menyesuaikan dan menempatkan diri pada posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional.

Kebijakan mendasar pemerintah terhadap pesantren adalah menempatkan sistem pendidikan pesantren sebagai sub sistem dari pendidikan nasional, sehingga pesantren merupakan bagian dari sistem yang berkembang di Indonesia yang diakui keberadaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pesantren memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan nasional, yaitu: peranan instrumental, peranan keagamaan, dan peran memobilisasi masyarakat.

Sebagai sub-sistem dalam pendidikan nasional, untuk mengidentifikasi berbagai problema yang dihadapi oleh pendidikan pesantren, ada baiknya juga memiliki beberapa problema yang dihadapi pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional menurut Vembriartoseditnya menjalankan 4 (empat) fungsi, yaitu: .[6]

1. Transmisi kultural, pengetahuan, sikap, nilai dan norma
2. Memilih dan mengajarkan pranata sosial
3. Menjamin integritas nasional
4. Mengadakan inovasi-inovasi.

Mengamati fungsi tersebut, tampak bahwa pendidikan pesantren kendatipun dalam konteks ke-Indonesiaan merupakan sub-sistem, sistem dan peranannya tidak jauh berbeda dengan peran Pendidikan Nasional tersebut. Untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, suatu sistem pendidikan harus sehat dan terus bergerak sesuai dengan perubahan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Salah seorang pengamat mengatakan bahwa:

Kita masih menghadapi krisis sistem pendidikan, utamanya jika dikaitkan dengan konteks masyarakat modern. Dalam hal ini ada 10 kecenderungan besar sistem Pendidikan Nasional dalam masyarakat maju Indonesia mendatang. Ke-10 kecenderungan itu meliputi: Pendidikan dasar, pendidikan menengah, kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga kependidikan, pendidikan keterampilan, pendidikan tinggi, desentralisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat, serta manajemen pendidikan.[7]

Pondok Pesantren selama ini tampak dengan wajah yang terkesan tradisional, klasik dan apa adanya. Namun tidak dipungkiri, dengan citra wajah yang muncul seperti itulah, justru pesantren tidak lapuk dimakan zaman. "Bahkan di tengah gempuran arus globalisasi yang kian "menggila", pesantren tetap mampu tampil memikat masyarakat untuk tetap dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Bahkan menjadi lembaga pendidikan yang paling diminati".[8]

Arus globalisasi yang kian hari kian terus membawa kebudayaan asing merasuk hampir ke seluruh aspek kehidupan manusia dewasa ini. Derasnya arus globalisasi ini tidak menggoyahkan eksistensi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan non-formal. Pondok pesantren mampu mengikuti irama gerak laju zaman tanpa harus terbawa dan tenggelam di dalamnya. Pondok pesantren selalu memodernisasi sistem pendidikannya dengan tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, akan tetapi juga mengajarkan mata pelajaran yang ada dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan sistem pendidikan seperti ini, maka pondok pesantren tidak hanya dapat bertahan, akan tetapi juga berkembang dan tidak pernah tertinggal. Maka wajar apabila pesantren mampu mencetak banyak pemikir Islam.

Selain itu, potensi pondok pesantren untuk memiliki kemandirian di bidang ekonomi juga bisa terealisasi melalui pendirian lembaga bisnis yang berbasis ekonomi syariah. Sebagai contoh pesantren mendirikan koperasi syariah, Baitul Malwat Tamwil

(BMT), dan lembaga lain yang menggunakan transaksi syariah. Selain itu dukungan dari pemerintah menjadikan santri lebih kreatif dalam berwirausaha karena sudah terdapat lembaga kursus dan pelatihan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan pesantren.

Pesantren harus dapat membuktikan diri bahwa ia bukanlah institusi pendidikan “kelas dua” yang terpinggirkan, kumuh, kolot, dan antikemajuan. Pesantren harus dapat memaksimalkan potensi yang telah dimilikinya; menambah wawasan dan berinteraksi secara maksimal dengan kemajuan zaman; berperan lebih aktif dalam ranah sosial masyarakat secara maksimal; dan mengaktualisasikan diri dalam rangka membangun masyarakat intelektual yang shalih. Kemudian pondok pesantren harus mampu menghadapi tantangan secara lokal dan global.

Penelitian yang penulis lakukan dilakukan di dua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor dan Kota Depok Jawa Barat; yaitu Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan Pondok Pesantren Al-Karimiyah Kecamatan Sawangan Baru Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Kedua Pondok pesantren tersebut mempunyai arah dan pandangan yang sama, disamping terdapat pendidikan madrasah juga terdapat pendidikan luar sekolah (pondok pesantren), yang juga dikembangkan keterampilan- keterampilan tambahan untuk para santrinya, seperti terdapatnya pelatihan- pelatihan kewirausahaan, usaha perdagangan, agrobisnis, kerajinan tangan dan jasa.

Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan Pondok Pesantren Al-Karimiyah Kecamatan Sawangan Baru Kota Depok Provinsi Jawa Barat membuka pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Dalam hal ini pengurus yayasan berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para santri, baik secara fisik maupun non fisik. Dengan demikian, apa yang dijelaskan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dapat tercapai dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Keberadaan pesantren sebagai bagian dari sub sistem pendidikan nasional, melalui pendidikan integratifnya diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yakni “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Ps.3).

II. METODOLOGI

Bab ini menjelaskan tentang metode dan langkah yang digunakan peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan, sekaligus sebagai alat analisis dalam melakukan penelitian di kedua pesantren yang menjadi objek kajian peneliti dalam disertasi ini. Melalui bab ini, diharapkan dapat terdeskripsikan dengan jelas, kaidah apa yang memperkuat keyakinan peneliti tentang besarnya kontribusi pesantren dalam usaha mencapai tujuan pendidikan Nasional yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan Pondok Pesantren Al Karimiyah Kecamatan Sawangan Baru Kota Depok Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis peneliti bahwa Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2011 sampai bulan Juni 2012. Penelitian dilakukan di dua pondok pesantren, yakni:

1. Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kecamatan Parung Kabupaten Bogor
2. Pondok Pesantren Al-Karimiyah Kecamatan Sawangan Baru Kota Depok Jawa Barat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong.[20] penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini lebih diarahkan pada upaya pencarian latar belakang, baik individu maupun kelompok secara holistik atau menyeluruh, faktor-faktor yang melatarbelakangi sebuah aktivitas yang dapat dilakukan oleh objek penelitian dan berbagai hal yang terdapat di dalamnya yang bersifat kompleks.

C. Langkah-langkah Penelitian

Ada tiga tahap yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dua objek kajian dalam penelitian ini. Ketiga tahap dimaksud adalah: Pra penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan melalui berbagai media dan alat yang digunakan oleh peneliti.

1. Pra penelitian

Tahap kegiatan ini adalah observasi awal peneliti dengan cara mengobservasi atau mengamati berbagai gejala yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pra penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian pendahuluan, utamanya terhadap upaya serta kontribusi kedua pesantren dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional.

Hasil dari tahap pra penelitian ini, oleh peneliti dituangkan ke dalam bentuk proposal penelitian disertasi. Kemudian dikonsultasikan kepada ahli-ahli yang kompeten dalam bidang pendidikan dan kepesantrenan. Setelah memperoleh masukan dan koreksi kemudian peneliti merumuskan kembali dan mengajukan proposal dimaksud kepada ketua Program Studi Pendidikan Islam, Universitas Ibn Kaldun Bogor untuk memperoleh rekomendasi agar dapat diseminarkan. Setelah itu, peneliti mendaftarkan proposal ke bagian administrasi untuk diseminarkan.

Pada bulan April 2011, peneliti dinyatakan lulus dan boleh melanjutkan proposal penelitian itu untuk dijadikan topik penelitian disertasi, tentu dengan upaya berbagai perbaikan di dalamnya, menyangkut isi, metode dan substansi kajian serta fokus penelitian.

2. Tahap Penelitian di Lapangan

Setelah memperoleh Surat Keterangan (SK) penelitian, peneliti melanjutkan penelitian ini ke tahap pelaksanaan penelitian di tingkat lapangan. Peneliti mengunjungi kedua pesantren untuk memperhatikan berbagai gejala dan dinamika santri. Peneliti juga menemui beberapa alumni pesantren. Di waktu yang berbeda, peneliti juga berkunjung ke kantor Kepala Desa dan Kantor Kecamatan setempat untuk memperoleh data dan informasi penunjang, khususnya terkait dengan peran serta kedua pesantren dimaksud dalam mensukseskan program-program yang dijalankan pemerintah setempat.

Dalam pelaksanaan pendidikan di lapangan, peneliti mempersiapkan diri dengan instrument penelitian yakni konsep pertanyaan yang akan diajukan kepada obyek

penelitian, dan perlengkapan fisik berupa kamera, tape recorder dan buku catatan. Selama pelaksanaan pada tahap ini, peneliti juga tinggal selama beberapa hari, di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah. Kegiatan yang dilakukan peneliti selama tinggal di kedua Pondok Pesantren ini diungkap melalui tahapan-tahapan berikut:

Tahap *pertama*, peneliti datang secara langsung ke lapangan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tinggal bersama para santri di pondok, untuk mengetahui kegiatan rutin santri, mulai dari bagaimana mereka belajar, jenis kitab yang mereka pelajari, pergaulan mereka dengan sesama santri, sikap santri dengan kyai dan komunikasi kyai dengan santri melalui berbagai kajian yang dilakukan.
- b. Turut serta dalam kegiatan rutin santri, tentang pengajian Kitab Kuning dan pelaksanaan peribadatan. Kegiatan keagamaan yang mereka lakukan umumnya shalat lima waktu dengan berjama'ah, shalat sunnah seperti shalat dhuha, tahajjud, dan ibadah sunnah lainnya, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis.
- c. Memperhatikan, menanyakan dan mencatat kegiatan Kyai dan para pengelola di dua Pondok Pesantren.
- d. Bersilaturahmi ke rumah-rumah Kyai, untuk memperoleh informasi tentang keluarga, pendidikan dan kegiatan Kyai selain melakukan aktivitasnya sebagai dewan guru pesantren dan pimpinan-pimpinan pesantren lain dalam makna yang luas.

Kesan dan temuan yang berhasil peneliti temukan di dua pesantren ini, kemudian dirumuskan ke dalam bentuk naskah awal atau draft. Melalui kajian ini, data sementara diperoleh, khususnya yang terkait dengan aktivitas- aktivitas umum yang dilakukan berbagai elemen di dua pesantren dalam memperkuat program-program kependidikan.

Tahap *kedua*, peneliti berkunjung dan *mondok* lagi dengan para santri di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengkonsultasikan draft sementara yang telah berhasil penulis susun dari hasil kegiatan di tahap pertama. Konsultasi dimaksud dilakukan kepada dewan guru, Kyai, santri senior, pengurus santri dan pengurus alumni.
- b. Tahap ini memberi masukan, koreksi dan usulan tambahan, khususnya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua pesantren. Usulan paling banyak diberikan oleh dewan kyai dan pengurus santri, serta santri senior, khususnya dalam konteks pemandirian santri melalui kegiatan- kegiatan keterampilan.
- c. Setelah itu, peneliti berkunjung dan mengumpulkan data dari lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah, terutama dokumen yang ada hubungannya dengan keadaan Kyai, ustadz dan ustadzah, santri dan sistem kepemimpinan dan pengajarannya, serta berbagai sarana/prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan kelembagaan kepesantrenan. Pada tahap ini, peneliti telah berhasil mengumpulkan data tentang kitab-kitab yang biasa digunakan Kyai dalam memberikan pembelajaran kepada para santri.

Setelah tahap kedua dilakukan selanjutnya peneliti melakukan tahap kerja, yakni peneliti berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah selama sepuluh hari. Pada tahap ini, peneliti berdialog atau melakukan

wawancara terbuka dengan Kiyai, santri dan masyarakat. Pada saat dialog atau wawancara berlangsung, peneliti meminta responden untuk mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah, peranan Kyai dalam pelaksanaan kegiatan kependidikan di dua pondok pesantren dimaksud dengan kegiatan masyarakat luas. Pada kegiatan ini, peneliti merekam, mencatat dan mengambil gambar, lokasi penelitian, aktivitas santri pada saat mengikuti kegiatan, pada saat shalat tahajud bersama, pada waktu shalat dhuha, shalat berjama'ah, aktivitas perbengkelan, aktivitas konveksi, aktivitas santri dalam pertanian, aktivitas santri dalam pengelolaan wartel dan kegiatan-kegiatan santri bersama masyarakat sekitar.

3. Tahap Penyusunan dan Konsultasi Hasil penelitian

Tahap *ketiga* adalah mengoreksi draft sementara yang telah memperoleh koreksi dan masukan dari seluruh elemen pesantren dari langkah tahap kedua, kemudian merumuskan kembali kedalam bentuk susunan draft peneliti yang lebih sistematis, sehingga tersusun *draft* semi permanen. *Draft* terakhir ini telah memasukkan unsur-unsur analisis peneliti dan siap untuk dikomunikasikan kepada promotor peneliti yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh lembaga Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Perlu juga dicatat bahwa sebelum peneliti datang kepada dua promotor yang dimaksud, peneliti mengkonsultasikan ulang dengan pimpinan dua pesantren tersebut dengan harapan memperoleh tambahan data yang diperlukan. Setelah peneliti merasa yakin telah memperoleh data yang sempurna, menurut ukuran peneliti, baru kemudian dikonsultasikan dengan para promotor.

Setelah memperoleh kritikan, masukan dan tambahan dari para promotor, peneliti mengajukan draft laporan disertai ini ke tahap pemantapan. Di tahap pemantapan laporan inilah peneliti memperoleh masukan baru, tambahan data kepastiakan dan sistematika penulisan serta teknik penulisan yang lebih relevan dengan model yang dikembangkan oleh Universitas Ibn Khaldun Bogor.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya menjadi unsur utama sebagai alat penelitian. Karena itu pula, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti lebih aktif mendatangi subyek penelitian. Namun demikian, sebagai alat bantu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik lain, yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan orang-orang yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi direkam atau ditulis oleh peneliti ke dalam lembar kertas kerja atau tape recorder yang telah dipersiapkan peneliti.

Peneliti melakukan wawancara secara terbuka dengan kyai dan pembina kedua pondok pesantren, santri serta masyarakat daerah sekitar. Saat melakukan wawancara, peneliti diberi kebebasan untuk memperoleh data dan informasi serta jawaban dari subyek peneliti sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Namun demikian, peneliti tetap berusaha mengarahkan dan menafsirkannya sesuai keperluan. Alat bantu utama yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara, disamping itu buku saku, ballpoint, tape recorder dan kamera

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah guru/ustadz yang dianggap mewakili dan mengetahui banyak tentang pesantren yang menjadi obyek penelitian.

Untuk keperluan itu di pesantren Darul Muttaqien dan Al- Karimiyah peneliti melakukan wawancara terhadap Kyai (2 orang), guru (ustadz dan ustadzah) sebanyak 3 orang, santri/siswa (2 orang) dan masyarakat (2 orang) dan alumni (2 orang) mengenai komentarnya, terhadap eksistensi pesantren ini. Wawancara dilakukan dengan mereka untuk menjaga netralitas peneliti agar hasil yang diperoleh mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat yang menjadi penentu dalam merumuskan orientasi pendidikan di kedua pondok pesantren tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan peninjauan langsung di lapangan penelitian dan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan selama penelitian ini berlangsung. Berbeda dengan wawancara, observasi lebih bersifat usaha peneliti untuk menangkap realitas yang ada yang berhasil peneliti amati. Oleh karena itu, teknik ini lebih bersifat analitis atas kesan yang berhasil peneliti peroleh.

Teknik observasi dalam penelitian ini ditujukan kepada komunikasi pesantren, yang memiliki ciri-ciri tertentu sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial. Khususnya terhadap Kyai, karena keterlibatannya yang mendalam sebagai pembina dan pembimbing sangat dominan dalam menentukan arah dan kebijakan sistem pendidikan di Pondok Pesantren.

Peneliti melakukan observasi partisipan terhadap berlangsungnya kegiatan di kedua pesantren dimaksud. Melalui keikutsertaan peneliti dalam beberapa kegiatan yang menurut peneliti dianggap patut untuk diikuti secara langsung. Seperti sebelum, sedang berlangsung maupun setelah pelaksanaan pengajian kitab kuning, pelatihan keterampilan, *muhadharah* dan kegiatan keterampilan lainnya. Disamping itu, peneliti juga mendatangi beberapa Kyai dan pembina santri untuk mengetahui perilaku Kyai dan para pembina, juga terhadap perilaku beberapa orang santri dan alumni pesantren, serta perilaku tokoh masyarakat lingkungan pesantren, peneliti melakukan observasi nonpartisipan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik mengambil rujukan dari data-data yang telah tersedia di Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al-Karimiyah, berupa foto, gambar, dan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan berbagai aktivitas pesantren sejak didirikan sampai dengan perkembangannya sekarang ini.

Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dan informasi yang dihimpun dari dua sumber, yaitu sumber insani dan sumber non insani. Sumber yang kedua terdiri dari dokumen rekaman. Rekaman adalah pernyataan yang dipersiapkan oleh pembina atau pengurus Pondok Pesantren Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah secara individual maupun secara kelembagaan dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau bukan, rekaman dan dokumen, dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu seperti surat-surat, buku harian, naskah pidato, editorial surat kabar, catatan khusus, skrip televisi ataupun foto-foto kegiatan.

Di suatu institusi kelembagaan terdapat dokumen resmi. Terhadap dokumen resmi ini Lexy J. Moleong membaginya ke dalam dua bentuk .[21]

Kedua bentuk dokumen dimaksud adalah dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal antara lain: memo, pengumuman, instruksi, aturan, rekaman hasil rapat ataupun keputusan pimpinan yang digunakan untuk kalangan sendiri sedangkan bentuk dokumen eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga, misalnya: majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang ditafsirkan kepada media masa.

E. Teknik Analisa Data

Peneliti menganalisis data dengan dua cara. Kedua cara dimaksud adalah:

- a) Melakukan penegasan terhadap tujuan penelitian
- b) Melakukan pengembangan pernyataan yang bersumber pada pedoman wawancara
- c) Memasukkan data baru ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan sub-masalah atau masalah penelitian lain yang muncul saat penelitian dilakukan
- d) Mengomentari secara umum
- e) Mendalami literatur yang berhubungan dengan data selama peneliti berada di lapangan.

Cara kedua dianalisis setelah semua data dikumpulkan. Setelah semua data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi/ pribadi, foto/gambar hasil dikumpulkan kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Langkah selanjutnya, diadakan reduksi data dengan jalan membuat abstrak yaitu rangkuman dari inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang akan selalu dijaga kerahasiaannya. Berikutnya peneliti menyusun dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemilihan Model Pendidikan Integratif

Pada awal kemunculannya model pendidikan pesantren adalah tradisional, dilihat dari struktur kepemimpinan pesantren, kurikulum, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah cukup tua di Indonesia. Masuknya lembaga pendidikan formal atau disebut dengan sekolah yang ke dalam lembaga pesantren menandai perubahan model pesantren tradisional menjadi modern. Hal ini merupakan salah satu dampak dari arus modernisasi.

Dalam perkembangannya, kemudian model pendidikan pesantren dikenal dengan nama *Salafiyah* dan *Khalafiyah*. *Salafiyah* adalah sebutan bagi pesantren tradisional dan *Khalafiyah* bagi pesantren modern. Dari awal pendiriannya Pondok Pesantren Darul Mutaqien dan Pesantren Al-Karimiyah, sudah memadukan kedua model tersebut.

Dari uraian di atas mengenai landasan diintegrasikannya model ini yang berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pengasuh kedua pesantren dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang melandasi hal tersebut. Namun yang paling mendasar adalah membekali santri dengan pengetahuan agama dan menjaga tradisi-tradisi dalam proses pengajarannya, membekali santri dengan pengetahuan umum dan keterampilan berbahasa asing sebagai jawaban dari tantangan globalisasi saat ini.

Landasan-landasan yang diutarakan oleh kedua pengasuh pesantren di atas sesuai dengan landasan-landasan sebagai berikut.

a. Landasan Filosofi

Maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu. Pendidikan telah merubah peradaban dari manusia primitif menjadi manusia modern. Namun pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan intelegensi semata, hanya akan melahirkan bangsa yang pintar untuk pemenuhan nafsu belaka, maka perlu digabungkan dengan kecerdasan emosi yang diharapkan dapat meredam dan mengendalikan nafsu pada diri seorang manusia. Kedua kecerdasan di atas hanya akan berdampak positif selama manusia di dunia yang bersifat materi, padahal manusia adalah himpunan dari jasad dan ruh, dimana akan menjalani keabadian ketika kembali ke pangkuan Tuhan. Maka pendidikan harus disempurnakan dengan kecerdasan ruhani.

b. Landasan religius

Berdasarkan pada firman Allah swt.di dalam Al-Qu`ān surat (*al-Qaṣaṣ* 28: 77):

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagianan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

c. Landasan Edukatif

Berhubungan dengan landasan edukatif, hal ini sesuai dengan definisi pendidikan dalam arti luas, yaitu segala pengalaman di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu. Berbeda dengan pendidikan dalam arti sempit yang bagi mereka yang berada pada sebuah lembaga pendidikan formal.

d. Landasan Konstitusional

Penyelenggaraan pendidikan pesantren berdasarkan pada:

1) Falsafah negara pancasila, bahwa sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa seluruh warga Indonesia harus beragama. Untuk merealisasikan sila pertama itu, maka perlu adanya pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak Islam berpartisipasi dalam merealisasikan sila pertama tersebut.

2) Undang-undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bunyi undang-undang tersebut mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Di samping itu negara melindungi umat beragama, untuk menunaikan ajaran agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Untuk itulah pendidikan agama sangat diperlukan agar umat beragama tersebut dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

B. Analisis Pelaksanaan Pendidikan Integratif di Pesantren Darul Mutaqien dan Pesantren Al-Karimiyah

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Ia merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Dari kawahnya, sebagai obyek studi telah lahir doktor-doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi,

sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini yang kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya.

Pesantren sebagai pranata pendidikan ulama (intelektual) pada umumnya terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi *tafaqquh fiddin* dan memotifasi kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai *warasat al anbiya*. Hal ini terus di pertahankan agar pesantren tidak tercerabut dari akar utamanya yang telah melembaga selama ratusan tahun. Bahwa kemudian muncul tuntutan modernisasi pesantren, sebagai dampak dari modernisasi pendidikan pada umumnya, tentu hal itu merupakan suatu yang wajar sepanjang menyangkut aspek teknis operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi, modernisasi tidak kemudian membuat pesantren terbawa arus sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler yang sekarang ini menjadi *trend*, dengan balutan pendidikan moderen, tidak mampu menciptakan generasi mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal dengan tradisionalnya justru dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan mempunyai kemandirian. Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok kepulauan nusantara, turut pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia "*character building*" bangsa Indonesia.[22]

Adapun pada hari-hari kemarin banyak opini negatif terhadap eksistensi pesantren, bahwa pesantren dinilai tidak responsif terhadap perkembangan zaman, sulit menerima perubahan (pembaharuan), dengan tetap mempertahankan pola pendidikannya yang tradisional (*salafiyah*) pesantren menjadi semacam institusi yang cenderung eksklusif dan isolatif dari kehidupan sosial umumnya. Bahkan lebih sinis lagi ada yang beranggapan pendidikan pesantren tergantung selera kyai. Masih banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap pesantren. Hal ini muncul karena memang banyak orang tidak mengenal dan tidak mengerti tentang pondok pesantren, sehingga mereka mempunyai penilaian yang salah terhadapnya. Adapun pada hari-hari kemarin banyak opini negatif terhadap eksistensi pesantren, bahwa pesantren dinilai tidak responsif terhadap perkembangan zaman, sulit menerima perubahan (pembaharuan), dengan tetap mempertahankan pola pendidikannya yang tradisional (*salafiyah*) pesantren menjadi semacam institusi yang cenderung eksklusif dan isolatif dari kehidupan sosial umumnya. Bahkan lebih sinis lagi ada yang beranggapan pendidikan pesantren tergantung selera kyai. Masih banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap pesantren. Hal ini muncul karena memang banyak orang tidak mengenal dan tidak mengerti tentang pondok pesantren, sehingga mereka mempunyai penilaian yang salah terhadapnya.

Sesuai dengan Keputusan bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/Kep/DS/2000 Tentang Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Tradisional yang dalam bahasa sering disebut sebagai Pesantren Salafiyah adalah salah satu tipe pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran pengajian Al- Qur'an dan kitab kuning secara berjenjang yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya menggunakan kurikulum.

Madrasah (MI/MTs atau MA) sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Ia lahir pada abad 20 dengan munculnya Madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada, pembaharuan tersebut, meliputi tiga hal, yaitu:

1. Usaha menyempumakan sistem pendidikan pesantren,

2. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan
3. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.[23]

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa: Pondok Pesantren merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional, oleh karena itu harus dikembangkan, diberi bimbingan, dan bantuan.[24]

Akan tetapi sedikit sekali pemimpin-pemimpin pesantren (kyai) yang menyadari potensi pesantren bagi pembangunan nasional, sedikit sekali yang mau introspeksi secara obyektif untuk beradaptasi secara positif terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun secara perlahan-lahan pemerintah membina dan mengarahkan pesantren agar bersikap adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Akhirnya, pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan Islam modern, seperti madrasah.

Pesantren sulit menerima perubahan secara total agar menjadi lembaga pendidikan semacam madrasah, dengan pendiri madrasah di dalam pesantren, pesantren tetap dapat dipertahankan sebagai tempat belajar agama Islam bagi para santri yang tinggal di pesantren atau disekitar pesantren. Selain itu kyai tetap bisa mengamalkan praktek agama sesuai dengan tradisi pesantren yang berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka. Dengan mendirikan madrasah, pesantren dapat memberikan relevansinya bagi tuntutan zaman dan masyarakat.

Sebelumnya santri- santri yang hanya memperdalam pengetahuan agama di pesantren banyak menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan di lapangan kerja karena mereka tidak menguasai keterampilan atau pengetahuan umum, bahkan tidak juga ijazah sebagai bukti formal bahwa mereka telah mempunyai kemampuan mejadi guru agama. Dengan didirikannya madrasah, santri yang belajar di madrasah, apalagi yang mendapat pengakuan dari Departemen Agama yang saat ini menjadi Kementerian Agama, akan mendapat kesempatan lebih besar dalam melanjutkan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu pesantren Tebuireng Jombang adalah pesantren pertama yang mendirikan SMP dan SMA, langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren- pesantren lain. Sedangkan madrasah bukan lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-10 M, atau 11 M.

Ada beberapa tokoh yang berpengaruh yang membantu menggerakkan pembaharuan tersebut diantaranya: Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ibrahim Musa Parabek, di Sumatra Barat, di Jawa muncul tokoh H. Ahmad Dahlan dengan gerakan Muhammadiyahnya, H. Hasan dengan gerakan persis

(Persatuan Islam), Haji Abdullah Halim dengan gerakan perserikatan ulama, K.h. Hasyim Asy'ary dengan organisasi Nahdatul Ulama.[25]

Sementara menurut Steenbrink ada empat faktor yang mendorong munculnya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia:

1. Sejak tahun 1990 telah banyak pemikiran untuk kembali ke al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada.
2. Dorongan kedua, adalah sifat perlawanan nasional terhadap penguasa colonel Benalda.
3. Dorongan ketiga, adanya usah-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya dalam bidang sosial dan ekonomi.
4. Banyak yang tidak puas dengan metode pendidikan tradisional di dalam mempelajari Al-Qur'an dan studi agama.[26]

Dari empat pendapat Steenbrink di atas pokok yang diperbaharui adalah: Pertama, materi pelajaran. Dimana sebelum lahirnya ide-ide pembaharuan pendidikan terfokus kepada pelajaran agama yang terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik seperti yang penulis telah uraikan sebelumnya, setelah masa pembaharuan pendidikan Islam materi pembelajarannya tidak lagi hanya sekedar pendalaman ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti aljabar, ilmu ukur, ilmu alam, kimia, ilmu hayat, ekonomi, tata Negara, bahasa Inggris, dan lainnya. serta metode pembelajaran tidak lagi terpaku kepada metode sorogan tetapi berkembang kepada metode lainnya.

Dengan demikian salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaharuan itu adalah madrasah, sementara perkataan madrasah baru populer di Indonesia setelah awal abad kedua puluh, padahal madrasah di dunia Islam telah berkembang sejak abad ke-sepuluh dan ke-sebelas Masehi. Madrasah di Indonesia adalah perpaduan antara pesantren dan sekolah, ada unsur-unsur yang diambil dari pesantren ada pula dari sekolah, unsur yang diambil dari pesantren adalah ilmu agama dan dari sekolah adalah ilmu pengetahuan umum.

Namun sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini munculkan isu dan didirikan oleh pesantren seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Problema-problema tersebut diantaranya adalah:

1. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum.

Dengan demikian maka penulis berasumsi bahwa sebagai subsistem pendidikan nasional, pendidikan integratif yang dilaksanakan di pesantren Darul Mutaqien dan pesantren Al-Karimiyah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya.

Oleh karena itu maka asumsi penulis bahwa model pendidikan integratif di kedua pesantren masih, memunculkan dualisme sistem Pendidikan. Dualisme pendidikan tersebut belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini bahkan tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka kesenjangan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam. Padahal

dikotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya.

Kemudian masih adalagi problema dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang manajerialnya. Lembaga swasta umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan. Meskipun telah ada garis kewewenangan yang memisahkan kedua top manager ini, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan membidangi penyediaan sarana dan prasarana, sering di dalam praktek terjadi overlapping, munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negarif, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab. Permasalahan inipun smapai saat ini masih sulit diatasi atau dikendalikan.

Setelah diundang-undangkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan, selanjutnya diikuti pula dengan lahirnya UU No.20 Tahun 2003.

- a. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- b. PP No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- c. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- d. PP No.30 Tahun 1990 yang kemudian disempurnakan dengan PP.60
- e. Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- f. PP No.72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- g. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- h. PP N0.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- i. PP No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Ada beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang Pendidikan Islam. Di dalam atauran tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. Pertama. Kelembagaan formal norformal dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui berdasarkannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai pendidikan nonformal dan masukan Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedua pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dikokohnya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didikdi semua jalaur, jenis dan jenjang pendidikan. Ketiga. Pendidikan Islam sebagai nilai, Terdapat seperangkat niali-nilai Islami dalam sistem Pendidikan Nasional.[27]

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pendidikan suatu Negara, Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan niali-niali luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know dan how to do*, yang amat penting adalah *how to be* bagaimana supaya *how to be*, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Oleh karena itu demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang berlaku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu

keseluruhan yang terpadu dari semua satuan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan pada pendiri Negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.
2. Tahun 1947, Kongres pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950, lahirnya UU No.4 Tahun 1950 undang-undang tentang Dasar pendidikan dan Pengajaran,
6. Tahun 1954, lahirnya UU No 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya NN No.4 tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional
9. Tahun 1989, lahirnya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional .UU No 2 Tahun 1989.
10. Tahun 1990, lahirnya PP No 27 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
11. Tahun 1990, lahirnya PP No 28, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
12. Tahun 1990, lahirnya PP No 30, tentang Pendidikan Tinggi
13. Tahun 1991, lahirnya PP No 72, tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460)
14. Tahun 1991, lahirnya PP No 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
15. Tahun 1992, lahirnya PP 38, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
16. Tahun 1999, lahirnya PP 60 tentang Pendidikan Tinggi
17. Tahun 1999, lahirnya PP No 61, tentang Penetapan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum
18. Tahun 2003, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem pendidikan Nasional yaitu UU No.20 tahun 2003 pengganti dari UU No.2 Tahun 1989.
19. Tahun 2005, lahirnya PP No 19, tentang Standar Nasional Pendidikan.[28]

Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (2), mengamanakan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai "suatu sistem pendidikan Nasional".

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah Negara, menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangun nasional.

Pendidikan Nasional mempunyai sistem pendidikan sebagai prana sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang.

Di kedua pesantren, berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa meski kedua pesantren mengkalim telah menerapkan model pendidikan integratif, namun menurut penulis pengintegrasian hanya sebatas pada penyatuan kelembagaan saja yakni lembaga pendidikan umum (formal) yang diwakili oleh pendidikan formal seperti MI/MTs dan MA, dan pendidikan salaf yang diwakili oleh pesantren. Di sisi lain model pendidikan semacam ini ternyata masih menyimpan persoalan. Di antaranya adalah persoalan dikotomi ilmu. Persoalan dikotomi ilmu memang tak lepas dari kungkungan metodologi dan epistemologi keilmuan barat. Mengganggu ilmu pengetahuan (akal) dan menyingkirkan peran Agama didalamnya, memang bagian yang tak bisa terpisahkan dari metodologi mereka. Di antaranya adalah persoalan dikotomi ilmu. Persoalan dikotomi ilmu memang tak lepas dari kungkungan metodologi dan epistemologi keilmuan barat. Mengganggu ilmu pengetahuan (akal) dan menyingkirkan peran Agama didalamnya, memang bagian yang tak bisa terpisahkan dari metodologi mereka. Sejak periode modern, post-modern hingga saat ini identitas tersebut masih sangat melekat pada tradisi mereka. Dampak dari dikotomi ilmu sebenarnya sangatlah besar, dan persoalan ini yang menjadi salah satu faktor kemunduran umat Islam. Realitas tersebut sederhana dapat dilihat, misalnya dalam dunia pendidikan, banyak sarjana agama yang mengabaikan dan tidak paham ilmu umum sehingga tidak mampu menjawab problematika keilmuan dan teknologi modern, sehingga menghambat penyebaran nilai-nilai Islam dalam ranah yang lebih luas. Sebaliknya banyak sarjana umum yang tidak paham agama, sehingga berefek pada degradasi moral, dan tentu ini merusak nilai kemurnian ilmu itu sendiri. di sinilah terlihat ketidakseimbangan, ketika sarjana agama hanya mampu menguasai ranah Syariat dan sarjana umum yang hanya ahli di bidang umum.

Dikedua pesantren masih ada dikotomi ilmu, yaitu terjadinya pemisahan sekolah umum dan agama di kedua pesantren. Dalam muatan kurikulum misalkan, Sekolah umum dominan ilmu yang diajarkan hanya ilmu umum (*science*) dan tidak digabungkan dan diarahkan pada nilai-nilai agama. Sehingga metode tersebut akan tergiring pada pola pikir yang sekuler dan berdampak pada degradasi moral, akhirnya memicu pada rusaknya generasi Islam, disebabkan pondasi ilmu agama yang lemah. Pada akhirnya, agama dianggap terpisah dengan persoalan ilmu dan dunia. Padahal dari sinilah kemudian banyak umat Islam tergiring pada pemahaman sekuler. Karena dari sejak sekolah sampai perguruan tinggi, konsep ini terus dipraktekkan secara sadar atau tidak dapat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir ummat. Ini adalah satu diantara contoh-contoh besar lainnya atas dampak dari dikotomi ilmu.

Khawatir dengan dampak yang diperoleh dari pengaruh dikotomi ilmu tersebut, perlu sebuah upaya yang serius dengan membersihkan dan menyingkirkan konsep sekuler tersebut dari ranah ilmu pengetahuan. Dan memperbaharunya dengan konsep keilmuan Islam di pesantren Darul Mutaqien dan pesantren Al-Karimiyah. Mungkin kendalanya adalah terletak pada bagaimana cara untuk merubah konsep tersebut hingga sistem keilmuan benar-benar bisa berjalan secara bersamaan dan saling terkait tanpa terjadi dikotomis atau parsial.

Syed Naquib Al-Attas menawarkan gagasan konsep yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan problem tersebut yaitu dengan cara islamisasi ilmu, terutama ilmu pengetahuan kontemporer dan modern karena ilmu-ilmu kontemporer dan modern telah

mengalami sekularisasi dengan *worldview* peradaban Barat. Metode pengkajian ilmu di Barat bergantung sepenuhnya kepada kaidah empiris, rasional dan materialistik. Perolehan ilmu melalui wahyu dan kitab suci diabaikan dan dipandang rendah. Ilmu-ilmu di Barat tidak berlandaskan nilai-nilai transenden dan juga tidak berkaitan dengan kepercayaan agama. Ini sangat berlawanan dari *worldview* Islam. Syed Naquib Al-Attas menegaskan bahwa, upaya islamisasi ilmu tersebut sangat penting dilakukan. Sebagai cara untuk membersihkan pengaruh-pengaruh negatif dalam ilmu pengetahuan dan kemudian memasukkan konsep-konsep keilmuan berdasarkan *Worldview* Islam. Sehingga antara ilmu umum dan agama tidak terpisahkan dan saling integral. Membiarkan ilmu dalam kondisi terpisah dari agama, akan melahirkan manusia yang memiliki paradigma sekuler, dan akhirnya melahirkan sikap yang cenderung mencampakkan Tuhan dan agama dari kehidupan dunia, tentu tidak sama halnya dengan kaum atheis yang menafikan Tuhan.[29]

Pandangan lain yang juga patut dipertimbangkan adalah menegok perjalanan sejarah dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang sudah melembaga dan menstruktur dalam masyarakat, maka kiranya patut diupayakan langkah-langkah strategis untuk merukunnya dalam satu bingkai yang saling melengkapi. Struktur keilmuan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang dikembangkan di pesantren semacam Darul Mutaqien dan Al-Karimiyah sejak awal berdirinya sampai saat terakhir masih berkuat pada konseptual hegemoni ilmu agama sebagai ilmu tertinggi dan kurang memberikan perhatian pada ilmu-ilmu umum. Pola pikiran konseptual yang abstrak dan cenderung dalam bentuk doktrin ini tentu harus dapat dijabarkan sedemikian rupa, dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengembangkan keilmuan yang berbasis pada eksperimen, observasi dan pendekatan ilmiah lainnya. Ilmu pengetahuan yang berbasis pada al-qur'an dan sunnah dapat direkatkan untuk digabungkan sedemikian rupa antara ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan. Ilmuwan dituntut untuk menolak dikotomi atau pemberian kategorisasi pada ilmu, sebagai ilmu umum dan ilmu agama. Sebab kategorisasi semacam itu adalah janggal dan rancu. Karena, Islam pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai ajaran yang bersifat khusus, sebab lingkup ajaran Islam luas, universal dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Masalah yang perlu ditegaskan adalah jika ilmu agama dan ilmu umum dikatakan sebagai ilmu, maka ilmu agama bersumber dari wahyu ilahi dan ilmu umum berasal dari observasi, eksperimen dan penalaran ilmiah manusia.

C. Analisis Pendidikan Integratif di Pesantren

Hampir terdapat kesepakatan di kalangan para ahli bahwa pendidikan merupakan faktor penentu yang paling dominan bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Berbagai persoalan rumit yang dihadapi suatu bangsa pasti dapat dilacak akar-akarnya pada problem yang terjadi dalam dunia pendidikannya.

Memang ia bukan satu-satunya faktor. Tetapi, setiap persoalan kompleks, seperti krisis multidimensi yang kini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia, dapat dipastikan sebabnya adalah kompleks juga. Ia bagaikan lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Tetapi, jika kita benar-benar hendak keluar dari musibah semacam ini, kita harus berani memutus satu titik dari mata rantai lingkaran setan tersebut, dan itu adalah bidang pendidikan.

Membincangkan pendidikan dalam konteks Indonesia tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai pendidikan pesantren; sebuah sistem pendidikan yang memiliki akar historis dalam tradisi dan budaya bangsa ini. Sehingga, pesantren disebut sebagai sistem pendidikan yang *indigenous*. [30]

Dalam perjalanannya yang panjang, lembaga pendidikan pesantren telah berkiprah secara signifikan pada zaman-zaman yang dilaluinya; baik sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, sebagai kubu pertahanan Islam, sebagai lembaga perjuangan dan dakwah, maupun sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Kiprah positif semacam ini harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana hal itu dilakukan ketika berhadapan dengan tantangan yang semakin rumit dan perubahan yang berlangsung begitu cepat sebagai dampak dari modernisasi?

Secara umum pesantren atau pondok didefinisikan sebagai “lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kyai sebagai sentral figurinya dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwoinya.” Sebagai lembaga yang mengintegrasikan seluruh pusat pendidikan, pendidikan pesantren bersifat total, mencakup seluruh bidang kecakapan anak didik; baik spiritual (*spiritual quotient*), intelektual (*intellectual quotient*), maupun moral-emosional (*emotional quotient*). Untuk itu, lingkungan pesantren secara keseluruhannya adalah lingkungan yang dirancang untuk kepentingan pendidikan. Sehingga segala yang didengar, dilihat, dirasakan, dikerjakan, dan dialami para santri, bahkan juga seluruh penghuni pesantren, adalah dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan cara ini pesantren telah mewujudkan sebuah masyarakat belajar yang kini dikenal dengan istilah *learning society*.

Demikian pula ketika proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di dunia pesantren dicermati secara lebih mendalam dan kemudian dicoba dibaca dengan menggunakan paradigma belajar (*learning paradigm*) yang lebih modern sebagaimana dirumuskan dalam empat visi pendidikan menuju abad 21 versi UNESCO, akan ditemukan bahwa proses-proses belajar modern tersebut bukanlah benda asing dalam pendidikan pesantren yang tradisional itu.[31]

Pertama, proses belajar yang bersifat teoritis dan berorientasi pada pengetahuan rasional dan logis (*learning to know/think*) adalah sesuatu yang inheren dalam pendidikan pesantren. Di pesantren para santri bukan hanya belajar untuk mengetahui, tetapi juga belajar untuk menyatakan pendapat secara kritis melalui berbagai media yang disediakan untuk itu. Istilah-istilah dalam tradisi dan sistem belajar di pesantren yang disebutkan berikut ini dapat mencerminkan apa yang dimaksudkan dengan paradigma belajar ini. Di antara istilah tersebut adalah sorogan, bandongan atau weton, dan halaqah, di samping istilah khithabah, munazharah, atau juga bahtsul masail. Sedangkan dalam tradisi pesantren yang sudah mengembangkan pendidikan modern tentu saja hal ini juga didapati dalam istilah-istilah yang berbeda.

Kedua, belajar untuk melakukan atau berbuat sesuatu (*learning to do*). Visi ini lebih terkait dengan sisi praktis dan teknis yang pencapaiannya dilakukan melalui pembekalan santri dengan ketrampilan-ketrampilan yang dapat membantunya menyelesaikan persoalan-persoalan keseharian yang dihadapinya. Ini tercermin, misalnya, dalam pendidikan kemandirian yang sangat kentara dalam kehidupan keseharian santri dari pagi hingga ke pagi lagi.

Ketiga, *learning to live together*. Pendidikan ini bermaksud menanamkan kesadaran bahwa kita hidup dalam sebuah masyarakat global dengan aneka ragam latar belakang sosial, budaya, bahasa, suku, bangsa, dan agama. Dalam kehidupan masyarakat yang demikian ini, nilai-nilai toleransi, tolong-menolong, persaudaraan, saling menghormati, dan perdamaian harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Dalam kaitan ini maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren merupakan pioner bagi terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat plural yang harmonis. Sebab, selain masalah

agama, seluruh keanekaragaman latarbelakang yang disebutkan di atas terdapat dalam masyarakat didik di pesantren, dan semuanya hidup dalam suasana yang damai dan harmonis.

Keempat, *learning to be*. Visi ini sangat kental hubungannya dengan dunia pesantren. Karena visi belajar yang secara harfiah berarti “belajar menjadi diri sendiri” ini pada intinya adalah pendidikan untuk membentuk sosok pribadi yang berakhlak karimah. Sejak semula pesantren adalah lembaga yang menjadi kawah penempaan akhlak mulia, dan perjalanan waktu telah membuktikan keberhasilan pesantren dalam menjalankan misi ini. Sehingga pesantren dapat disebut sebagai basis pertahanan akhlak dan moral bangsa pada masa-masa krtitis. Pendidikan ini jelas sangat penting di tengah derasnya arus kehidupan modern yang serba permisif dan hedonis.

Selanjutnya para ahli menyimpulkan keempat visi belajar tersebut menjadi satu kata kunci yang mencakup semuanya, yaitu *learning how to learn*, artinya belajar bagaimana belajar. Di sini anak didik menjadi pembelajar sejati, dia dapat belajar mengenai apa saja, dari siapa dan apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Proses belajar telah menjadi suatu sikap kepribadian dan karakter yang melekat pada diri seorang peserta didik. Bagi pembelajar sejati ini, alam adalah sebuah sekolah yang besar (*al-`alam madrasatun kubra*). Disadari atau tidak, kepemilikan ketrampilan hidup (*life skill*) berupa *learning how to learn* ini telah menjadi ciri yang menonjol dari para lulusan pendidikan pesantren. *Learning how to learn* sebagai ketrampilan hidup ini ditanamkan di pesantren melalui berbagai cara; dari pengajaran formal, pengajian, pengarahan, pembimbingan, penugasan, pelatihan, penataran, dan seterusnya bahkan terkadang juga pemaksaan. Sehingga, seperti telah disebutkan di atas, “segala yang didengar, dilihat, dirasakan, dikerjakan, dan dialami para santri, bahkan juga seluruh penghuni pesantren, adalah dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan”. Dengan cara inilah ketrampilan *learning how to learn* itu disemaikan.

Pada tataran lain, para ahli pendidikan saat ini juga tengah gencar menggalakkan pelaksanaan konsep-konsep pendidikan modern semisal manajemen berbasis sekolah (*school based management*), pendidikan berbasis sekolah (*school based education*), ataupun pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Sekali lagi, jika diperhatikan secara seksama, konsep-konsep ini pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali tidak dikenal oleh dunia pesantren. Istilah-istilahnya saja yang baru, tetapi maksud dan isinya sebenarnya telah menjadi ciri khas sistem pendidikan pesantren dengan tingkat intensitas penerapannya yang bervariasi.

Demikian pula dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), yaitu penyusunan kurikulum yang didasarkan pada kemampuan dasar minimal yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik setelah yang bersangkutan menamatkan satu unit pelajaran, satu satuan waktu, dan atau satu satuan pendidikan. Meski belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan tuntutan rumusan konsep mengenai hal ini, nuansanya telah dapat dicermati dalam sistem pendidikan pesantren. Contohnya seorang santri di kelas tertentu mesti sudah menguasai ketrampilan atau kecakapan akademik tertentu, memiliki kualitas spiritual tertentu, dan memiliki karakter tertentu pula.

Tetapi ini tidak berarti bahwa pendidikan pesantren telah memiliki segalanya. Sebab kenyataannya banyak pesantren di mana baginya konsep-konsep sebagaimana dibahas di atas hanya berupa potensi yang belum diaktualisasikan, dan banyak juga yang telah mengaktualisasikannya tetapi belum disertai dengan kesadaran, ataupun dengan kesadaran yang rendah; sedangkan di sisi lain perubahan berlangsung begitu

cepat dan tantangan yang dihadapi pesantren juga semakin berat. Karena itu, sudah semestinya pesantren selalu berintrospeksi dan melakukan otokritik agar tetap dapat berkiprah secara positif dalam membangun umat dan bangsa ke depan.

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan penelitian ini melalui pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan model pendidikan integratif di pesantren Darul Muttaqien dan pesantren Al-Karimiyah, sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Integratif, adalah lembaga pendidikan yang menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, baik pada tataran teologis, filosofis, teoritis-akademis, dan bahkan pada tataran praktisnya. Pendidikan Integratif harus memadukan dua hal yang sampai saat ini masih diperlakukan secara dikotomik, yaitu mengharmoniskan kembali relasi *wahyu* dan *akal*. Pendidikan integratif "memadukan pendidikan *aqliyah*, *ruhiyah* dan *jas-addiyah*. Dalam penyelenggaraannya pendidikan integratif di pesantren harus memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar, yaitu sekolah, rumah/pondok pesantren dan masyarakat. Konsep pendidikan integratif dalam proses pembelajaran dapat diartikan memadukan secara utuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Konsekuensinya, kegiatan belajar harus mampu menstimulasi ketiga ranah tersebut dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode dan sarana belajar. Belajar tidak hanya berlaku pada pembahasan konsep-konsep dan teori belaka. Setiap pokok bahasannya serta membimbing mereka untuk masuk pada aplikasinya. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan mestilah berbasis *student active learning*. Selain itu pendidikan integratif, diartikan sebagai model pendidikan yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan pendidikan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu bangunan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah formal tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai-nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada "*pemisahan*" dimana pelajaran dan semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran Islam, atau Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan. Pendidikan model integratif berupaya menjawab berbagai problema pendidikan dewasa ini. Konsep model pendidikan integratif ini tidak hanya bertumpu pada pengembangan kompetensi kognitif peserta didik semata, tetapi juga pada penanaman nilai etika, moral, dan spritual. Pendidikan tidak cukup jika hanya diajarkan melalui kurikulum. Untuk menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan harus membentuk sebuah tradisi dan budaya yang kelak menjadi bibit-bibit peradaban. Pendidikan integratif seyogyanya juga tidak hanya tercermin dari bahan ajar yang disajikan di kelas, bahkan lebih dari itu menyangkut seluruh aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Aspek-aspek itu misalnya menyangkut hubungan-bungungan antar dan interpersonal yang mencerminkan adanya nuansa ke-Islaman, lingkungan yang menggambarkan kebersihan dan kerapian serta keindahan, hak dan kewajiban diwarnai oleh suasana hati yang serba ikhlâs, syukur, sabar, tawakkal dan istiqâmah. Uswah hasanah dari seluruh komponen yang dapat diwujudkan. Sebab bukankah pendidikan itu sesungguhnya adalah proses keteladanan-uswah hasanah dan pembiasaan.

Optimalisasi nilai-nilai moral-spiritual kedalam budaya edukatif sangat urgen untuk mengatasi ketimpangan antara kualitas kognisi dengan aspek non-kognisi yang

selama ini masih berlaku dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila penulis menyimpulkan bahwa pesantren dengan model pendidikan integratifnya merupakan sebuah model contoh ideal satuan pendidikan yang mampu mengimplementasikan *character building* secara kaffah!

2. Pengelolaan pendidikan di kedua pondok pesantren tersebut masih mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) melalui kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang ditulis oleh para ulama' abad pertengahan. Namun demikian di kedua pondok pesantren tersebut pendidikan tidak sekedar terfokus pada kitab-kitab klasik (baca: ilmu agama) saja, tetapi juga memasukkan mata pelajaran dan keterampilan umum. Hakekat pendidikan adalah suatu usaha mengantarkan peserta didik untuk dapat menggali potensi dirinya menjadi suatu realitas yang real. Oleh karena itu, kegiatan dan proses belajar-mengajar dalam suatu pendidikan adalah penumbuhan dan pengembangan peserta didik sesuai dengan hakekat potensinya tersebut. Dalam pengembangan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik, dipahami bahwa suatu pendidikan yang baik harus menjawab tiga ranah kemanusiaan yakni ranah kognitif (intelektual), ranah afektif (emosional), dan ranah psikomotorik (pengamalan). Tidak ada proses pendidikan yang dianggap sempurna jika meninggalkan salah satu diantara ketiga ranah tersebut. Pendidikan yang hanya cenderung pada ranah kognitif saja akan melahirkan generasi yang genius secara intelektual tetapi kering emosional dan rendah kualitas pengamalannya.

Pengetahuan kognitif dan diikuti kesadaran emosi saja tidak dapat menggali potensi realitas secara optimal, namun harus diikuti dengan penggarapan ranah psikomotorik. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang tercipta karena kepemilikan pengetahuan intelektual dan memiliki keinginan untuk berbuat oleh adanya dorongan emosional, tetapi tidak dapat benar-benar terwujud suatu tindakan yang nyata akibat tidak tergarapnya ranah psikomotorik. Penggarapan ranah psikomotorik terkait dengan pengembangan etos kejujuran, kerja keras, profesional, kesopanan, dan sosial-filantropik dalam bentuk disiplin dan latihan-latihan nyata. Dengan demikian pendidikan Islam, dalam prosesnya, menyertakan program intensif peningkatan intelektual dan menghidupkan aspek spiritual yang akhirnya dapat menjadi modal untuk hidup dalam kebudayaan bangsa yang selalu berkembang seiring pencapaian kemajuan peradaban manusia.

3. Sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan integratifnya sungguh sangat unik, bahkan bisa dikatakan *genuin* dari sistem pendidikan nasional.

Pada awalnya pesantren sengaja berdiri di desa-desa tidak lain untuk menghindari dari kolonialisme Belanda. Sistem yang digunakan pesantren sungguh sangat berbeda dengan instansi atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Singkatnya, sistem dan gaya pendidikan seperti pesantren ini merupakan hasil produksi dan kreasi bangsa Indonesia (baca: Wali Songo) dalam menyebarkan agama Islam.

Dalam hemat penulis, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi kontribusi pesantren dengan pendidikan integratifnya terhadap pendidikan tujuan nasional. *Pertama*, pesantren sebagai alternatif pendidikan. Pertimbangan biaya pendidikan, pesantren merupakan alternatif pendidikan bagi kalangan yang tidak mampu. Karena itulah, biaya pendidikan di pesantren harus diminimalisir. Jika memang pesantren tidak mampu, lalu kepada siapa lagi rakyat miskin yang memiliki inisiatif menyekolahkan anaknya. *Kedua*, pendidikan moral. Diakui atau tidak, moralitas merupakan pangkal dari krisis multidimensi yang berkepanjangan yang melanda bangsa

Indonesia ini. Pemerintah, wakil rakyat, pejabat lemah dalam hal moralitas. Akibatnya, korupsi semakin tak tertandingi, lalai dalam menegakkan hukum, keadilan tidak segera tercapai, nepotisme dan kolusi merajalela. Bahkan, pembunuhan, konflik agama, pertengkaran merupakan dampak dari rendahnya moralitas bangsa. Agama dijadikan komoditas politik, legitimasi penguasa yang despotik, perampasan hak-hak asasi dan lain sebagainya. Pendidikan pesantren mampu menjawab itu melalui pendidikan integratifnya. *Ketiga*, pesantren sebagai pusat studi agama. Salah satu ketegangan yang baru saja sedikit meredup adalah sistem pengajaran agama dalam Sisdiknas. Secara tidak langsung, pesantren sama sekali dinafikan. Sebab, pesantren yang selama ini dianggap sebagai pusat studi Islam pada kenyataannya masih diperbebatkan keberadaannya. Namun demikian, kesemua itu mengandaikan adanya sebuah perubahan yang mendasar diinternal pesantren. Diantaranya adalah sistem pendidikan pesantren.

Ada beberapa nilai fundamental pendidikan integratif di pesantren yang kemudian membentuk pola pendidikan yang dapat dijadikan sebagai salah satu model Pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai fundamental itu adalah: Komitmen untuk *Tafaqquh Fiddin* Pendidikan sepanjang waktu (*fullday school*), Pendidikan terpadu (*Integratif*), Pendidikan seutuhnya (*afektif, kognitif, psikomotorik*). Keterlibatan pesantren "secara formal" dalam sistem pendidikan nasional akan semakin mengukuhkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas manusia, baik hubungannya dengan Tuhan (*habl min Allah*) maupun korelasinya dengan sesamanya (*habl min an-nas*). Dengan demikian dapat disimpulkan, pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap tujuan pendidikan nasional.

Dengan didirikannya pesantren- pesantren umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. Akan tetapi, yang pasti, untuk membuktikan secara praktis, idealitas pemaduan ini memerlukan waktu dan pemikiran mendalam.

REFERENCES

- [1] Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 39 ayat 2.
- [2] H.M, Arifin. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hal 23.
- [3] Amie Primarnie. *Membangun kerangka pendidikan Islam menuju konsep pendidikan monokotomik holistic. Seri Kajian Pendidikan Islam*. (Jakarta: Pustaka Insan, 2005), hal 76.
- [4] Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", Pengantar dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan/Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. Xiv
- [5] Nurcholish, Madjid. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 130.
- [6] St. Vembriarto. "Beberapa Aspek Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional", dalam Ismail SM, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 171-172.
- [7] Syamsul Arifin, "Tantangan Pendidikan: Revitalisasi Agama dalam Pendidikan Nilai Budaya", dalam Ismail SM, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 172.
- [8] Shobirin,. "Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren," *dalam Dawa Rahardjo (ed) Pergumulan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), hal. 56.
- [9] H. Ahmad Damanhuri, *Pengelolaan Pesantren Terpadu*, Disertasi, Program Pascasarjana UIKA Bogor, Bogor, 2012.
- [10] Harin Umum Mitra Dialog edisi 14 September 2010.

- [11] Irmayuliani, *Optimalisasi Pesantren sebagai Pusat Peradaban Muslim*, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009
- [12] W.L. Rutherford dalam *An Investigation of How How Teachers' Concern Influence Innovation Adaption*, American Educational Research Journal, 20 June, 1977, hal 263-276.
- [13] Ahmad Syamsu Rizal, *Pesantren Dari Pola Tradisi ke Pola Modern*, Desertasi, UPI, Bandung, 2001.
- [14] Imam Sarkowi. MA, *Pembaharuan Pemikiran Pesantren*, Desertasi, Fakultas Sains dan Tenologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011
- [15] Finisa Anggriaa, (2010) *Pondok Pesantren di Kendal*. Desertasi, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Undip.
- [16] Kafrawi Ridwan, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: PT Cemara Indah, 1978) hal. 133
- [17] Yasmadi. *Modernisasi Pesantren, Kritik Nur Cholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press.200), hal. 221
- [18] Sa'id Aqiel Siradj, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 181
- [19] Maksum Mukhtar, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 159
- [20] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), hal. 225
- [21] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), hal. 20
- [22] Faisal Ismail, *Percikan Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), hal.69
- [23] Maksum. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Hal. 56
- [24] Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 185
- [25] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung, Cipta Pustaka Media, 2001, hal.47
- [26] Karel Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta, LP3ES. 1986,hal, 46-47
- [27] Undang-undang Sisdiknas, *UU No.20 tahun 2003*, Departemen Agama RI,Jakarta, 2003
- [28] Haidar Putra Daulay, *Op Cit*, hal.11
- [29] <http://rezaaceh.wordpress.com/2010/10/28/problem-dikotomi-ilmu>. Diakses pada tanggal 8 September 2012.
- [30] Halaqah Pengasuh Pondok Pesantren se Jawa Tengah dengan Tema "*Kontribusi Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Nasional*", diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Kamis, 16 Oktober 2010, di Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9, Semarang.
- [31] Ismail SM. *Pendidikan Islam, Demokratisasi, dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hal 126